

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil judul mengenai Analisis Efektivitas Program Parkir Elektronik dalam Meningkatkan PAD Kota Medan (Studi Kasus Dinas Perhubungan Kota Medan). Fokus dalam penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan program parkir elektronik di Kota Medan, serta kontribusi dari penerimaan retribusi parkir elektronik terhadap PAD di Kota Medan. Lokus penelitian ini di Dinas Perhubungan Kota Medan karena dapat diperoleh data primer atau data secara langsung retribusi parkir yang masuk, dimana dinas perhubungan kota medan melakukan mekanisme pemungutan retribusi parkir melalui Unit Pelaksanan Teknis Dinas (UPTD) kota Medan.

Retribusi parkir merupakan salah satu potensi yang dikelola untuk dijadikan sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam wilayahnya. Hal tersebut menjadi tolak ukur dalam menilai tingkat pendapatan asli daerah yang diperoleh wilayah tersebut. Hasil dari pendapatan tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan wilayah itu sendiri, khususnya dalam membangun fasilitas dan sarana perbaikan lahan parkir yang berdampak pada tata kelola dalam pelaksanaan parkir berjalan baik dan tidak mengganggu pengguna jalan lainnya.(Pratiwi, 2008).

Diantara retribusi daerah yang ada, retribusi parkir merupakan sumber pendapatan di Kota Medan, dimana dalam hal ini dikelola Dinas Perhubungan

Kota Medan. Seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat khususnya di Kota Medan, berdampak pada banyaknya pengguna kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda dua. Hal tersebut secara otomatis akan meningkat pula terhadap penerimaan retribusi parkir jika dikelola dengan baik.

Akan tetapi beragam upaya dan cara pengelolaan parkir yang dilaksanakan selama ini dirasakan masih belum optimal dan maksimal. Beragam tantangan bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan parkir, meliputi bagaimana cara mencegah kebocoran pendapatan dari retribusi parkir, cara untuk meningkatkan pendapatan pemda dari retribusi parkir, upaya untuk mengendalikan kinerja Juru Parkir dengan mudah, cepat dan akurat, cara untuk memonitor setiap transaksi pembayaran parkir di semua lokasi parkir, serta usaha untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk mengawasi layanan parkir di Kota Medan.

Dari beragam tantangan tersebut, akhirnya wali Kota Medan, menerapkan program e-parking melalui keputusan yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Medan No.45 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Parkir Umum, Pemko Medan memastikan jika seluruh parkir di Kota Medan akan segera menggunakan sistem transaksi Nontunai atau E-Parkir di setiap sudut jalan di Kota Medan, termasuk parkir pinggir jalan. Dalam Peraturan Wali Kota tersebut dikeluarkan kebijakan baru tentang pengelolaan sistem parkir bagi hasil untuk parkir tepi jalan.

Dalam Peraturan Wali Kota itu, Pemko Medan menawarkan atau memberi peluang yang sebesar-besarnya kepada perorangan maupun Badan Usaha yang ingin mengelola ruas jalan sebagai kawasan perparkiran di Kota Medan lalu Pemko

akan memberikan sistem bagi hasil bagi pihak pengelola. Penerapan atau implementasi parkir elektronik di kota Medan dilandasi dengan himbauan dari Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ Tahun 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. E-Parkir adalah Solusi Pengelolaan Retribusi Parkir secara Elektronik untuk Pemerintah Daerah.

Pemanfaatan Teknologi Informasi pada sektor pemerintahan sebagai solusi dari permasalahan pelayanan pemerintahan dalam pelayanan parkir kendaraan (Rahman et al., 2019). Tujuan dari penerapan program e-parking ini adalah agar dapat mengurangi beberapa resiko bagi pemerintah, yaitu mengurangi praktik juru parkir manual serta mengurangi resiko fraud khususnya kebocoran retribusi karena masih ada proses manual yang dilakukan manusia. Layanan e-Parking hadir sebagai inovasi solusi terbaru untuk menyelesaikan permasalahan dan tantangan pengelolaan parkir bagi Pemerintah Daerah.

Keuntungan dari layanan e-parking ini adalah, membantu pengelolaan parkir dan retribusinya di lingkungan pemda lebih terkendali, transparan, cepat, mudah dan akuntabel, melibatkan partisipasi aktif masyarakat pengguna parkir untuk membantu pengendalian dan pengawasan pengelolaan parkir dan retribusinya, meningkatkan pendapatan daerah dari retribusi parkir lebih terkendali dan maksimal dengan melibatkan kontribusi aktif masyarakat, meningkatkan kesejahteraan para jukir dengan lebih adil dan merata. Pemerintah Kota (Pemkot) Medan sudah menerapkan e-parking di sejumlah ruas jalan Kota Medan sejak awal tahun 2022, Setidaknya sudah ada 150 ruas jalan yang sudah menerapkan e-

parking di akhir 2022. Penerapan e-parking di 87 ruas jalan tersebut merupakan pengembangan dari 63 ruas jalan yang sudah diterapkan terlebih dahulu. Sehingga saat ini ada 150 ruas jalan. Adanya peningkatan pendapatan lebih dari 150 persen dari 22 titik lokasi parkir elektronik. Tarif dalam parkir elektronik di tepi jalan ini bersifat flat, tidak tergantung waktu dan menggunakan metode pembayaran QRIS ataupun uang elektronik.

Sebelum penerapan program e-parking di Kota Medan, perolehan selama 24 hari hanya berkisar Rp80.000.000 juta. Setelah penerapan e-parking pada 22 titik di Medan terbukti meningkatkan Pendapat Asli Daerah (PAD). Selama 24 hari penerapan sejak 18 Oktober lalu, perolehan PAD dari 22 titik lokasi parkir tepi jalan ini sebesar Rp200.000.000 juta. Penerapan program parkir elektronik diharapkan memberikan kontribusi yang positif bagi daerah terutama dalam hal PAD karena pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan daerah.

Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana peranan PAD diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Data PAD yang masuk di peroleh dari Dinas Perhubungan Kota Medan menunjukkan perbedaan jumlah yang signifikan jauh pada 2021 sampai 2022, dimana sebelum dan sesudah diberlakukannya program e-parking di Kota Medan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1 Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan dari E-Parking

Bulan	Penerimaan PAD sebelum adanya e-parking Tahun 2021	Penerimaan PAD sesudah adanya e-parking Tahun 2022	Persentase Kenaikan (%)
Januari	Rp.297.127.000	Rp.548.497.500	85%
Februari	Rp.272.612.000	Rp.503.245.200	85%
Maret	Rp.305.339.000	Rp.563.664.450	85%
April	Rp.294.430.000	Rp.543.524.700	85%
Mei	Rp.297.129.000	Rp.548.497.500	85%

*Sumber: Dishub Kota Medan 2023*

Wali kota medan juga mengharapkan setelah diterapkannya parkir elektronik ini dapat meningkatkan retribusi parkir yang bisa berkontribusi besar bagi PAD Kota Medan, mengingat jumlah kendaraan di Kota Medan yang cukup banyak. Catatan Badan Pusat Statistik (BPS) yang diperoleh dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara, ada sekitar 275.000 kendaraan yang terdaftar di UPT Samsat Kota Medan. Kondisi ini menunjukkan potensi PAD dari retribusi parkir cukup besar.

Dari latar belakang tersebut peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian mengambil judul: “ **Analisis Efektivitas Program Parkir Elektronik dalam Meningkatkan PAD Kota Medan (Studi Kasus Dinas Perhubungan Kota Medan)** “. Adapun alasan lain peneliti ingin meneliti topik pembahasan ini adalah untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan program parkir elektronik di Kota Medan, serta kontribusi dari penerimaan retribusi parkir elektronik terhadap PAD di Kota Medan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program parkir elektronik di Kota Medan?
2. Bagaimana kontribusi dari program parkir elektronik terhadap peningkatan PAD di Kota Medan?

## **1.3 Tujuan penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

3. Untuk mengetahui pelaksanaan program parkir elektronik di Kota Medan
4. Untuk mengetahui kontribusi dari penerimaan retribusi parkir elektronik terhadap PAD di Kota Medan

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang terdapat pada penelitian ini adalah :

1. Manfaat secara Akademis
  - a. Bagi peneliti : Seluruh rangkaian kegiatan dan hasil penelitian diharapkan dapat memantapkan penguasaan keilmuan yang dipelajari selama mengikuti program perkuliahan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas HKBP Nommensen Medan.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan memperoleh wawasan pengetahuan yang lebih mendalam tentang Efektivitas Program Parkir Elektronik untuk meningkatkan PAD di Kota Medan.

## 2. Secara Praktis :

- a. Peneliti ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi instansi terkait dalam hal pelayanan masyarakat dan membantu dalam menerapkan dan memperkenalkan sebuah program e-parking yang lebih efektif dibandingkan pembayaran non tunai kepada seluruh.
- b. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para pihak yang membutuhkan bacaan tambahan terkait tentang Efektivitas Program Wali Kota Medan dalam Penerapan Parkir Elektronik untuk meningkatkan PAD di Kota Medan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kebijakan Publik**

##### **2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik**

Pengertian kebijakan publik yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye (1975), dalam Syafie (2006:105) menyatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan (mendiamkan) sesuatu itu (*whatever government choose to do or not to do*)”. Dye dalam Harbani Pasolong (2008) mengemukakan bahwa bila pemerintah mengambil suatu keputusan maka harus memiliki tujuan yang jelas, dan kebijakan publik mencakup tindakan pemerintah, bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja (Ii et al., 2008).

##### **2.2.2 Ciri-ciri Kebijakan Publik**

Kebijakan publik merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan dalam suatu negara modern dalam menyelesaikan suatu masalah, dan kebijakan publik mempunyai ciri-ciri khusus yang melekat dan bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu lazim dipikirkan, oleh orang-orang yang mempunyai otoritas. Menurut ahli Kebijakan Gerston, kebijakan publik itu di buat dan dijalankan oleh orang-orang yang telah diberikan wewenang untuk bertindak dengan persetujuan populer dan sesuai dengan norma-norma dan prosedur(Ii et al., 2008).

- a. Kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang sengaja dilakukan secara terarah pada tujuan tertentu, bukan sekedar sebuah tindakan asal-asalan atau dilakukan secara acak atau tindakan serba kebetulan, yang sudah disiapkan secara matang oleh unit/badan perencanaan di tingkat kabupaten/kota dan pusat, yang saling berkordinasi antar lembaga.
- b. Kebijakan pada hakikatnya adalah sebuah tindakan yang saling berkaitan dan berpola, yang mengarah pada tujuan tertentu, yang dilakukan oleh negara melalui keputusan yang sudah dibuat dan diputuskan bersama- sama, yang kemudian di implementasikan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang sudah di buat.
- c. Suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah ialah dalam bidang-bidang tertentu. Misalnya, mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, menghapus kemiskinan, mencegah atau membrantas korupsi, menurunkan buta aksara yang berada dimasyarakat, membuat program bantuan sosial seperti program keluarga berencana, Jaminan kesehatan, jaminan sosial, perumahan rakyat, dan lain sebagainya.
- d. Dalam suatu kebijakan publik mungkin bisa berbentuk positif, mungkin pula bisa berbentuk negatif, kemungkinan ini meliputi keputusan- keputusan para pejabat pemerintah yang memegang otoritas, untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun yang terjadi di masyarakat, dalam mengatasi masalah yang dimana justru campur tangan pemerintah diperlukan di masyarakat.

Hakikatnya suatu kebijakan publik sebagai jenis tindakan yang mengarah pada satu tujuan, dan akan kita pahami lebih baik lagi, apabila kebijakan itu masuk kedalam beberapa katagori seperti, tuntutan kebijakan, keputusan kebijakan, keluaran kebijakan, hasil akhir kebijakan.

## **2.2 Governasi Digital**

### **2.2.1 Pengertian Governasi Digital**

Menurut Indrajit (2002:36) E-government merupakan suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan, dengan melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet) dengan tujuan memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan. E-Government adalah penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efisien, efektif dan interaktif.

Dimana pada intinya E-Government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain (penduduk, pengusaha, maupun instansi lain). Indrajit (2002:1) mengatakan, berbeda dengan definisi E-Commerce maupun E-Business yang cenderung universal, E-Government sering digambarkan atau dideskripsikan secara cukup beragam oleh masing-masing individu atau komunitas. Hal ini disebabkan karena berbagai hal:

- a. Walaupun sebagai sebuah konsep E-Government memiliki prinsip-prinsip dasar yang universal, namun karena setiap negara memiliki skenario implementasi atau penerapannya yang berbeda, maka definisi dari ruang lingkup E-Government pun menjadi beraneka ragam;
- b. Spektrum implementasi aplikasi E-Government sangatlah lebar mengingat sedemikian banyaknya tugas dan tanggung jawab pemerintah sebuah

negara yang berfungsi untuk mengatur masyarakatnya melalui berbagai jenis interaksi dan transaksi.

- c. Pengertian dan penerapan E-Government di sebuah negara tidak dapat dipisahkan dengan kondisi internal baik secara makro maupun mikro dari negara yang bersangkutan, sehingga pemahamannya teramat sangat ditentukan oleh sejarah, budaya, pendidikan, pandangan politik, kondisi ekonomi, dari negara yang bersangkutan
- d. Visi, misi, strategi pembangunan sebuah negara yang sangat unik mengakibatkan terjadinya beragam pendekatan dan skenario dalam proses pengembangan bangsa sehingga berpengaruh terhadap penyusunan prioritas pengembangan bangsa.

Dalam Jurnal Administrasi Negara (2006:18) mengatakan bahwa aplikasi teknologi E-Government adalah respon terhadap perubahan lingkungan strategi yang menuntut adanya perubahan administrasi publik yang lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Secara perlahan namun tidak menghilangkan batas-batas negara dan peradaban bangsa yang sebelumnya bersifat homogen dan monopolistik bergeser ke arah sesuatu yang heterogen dan demokratis.

Budi Rianto dkk (2012:36) menyimpulkan bahwa E-Government merupakan bentuk aplikasi pelaksanaan tugas dan tata laksana pemerintahan menggunakan teknologi telematika atau teknologi informasi dan komunikasi. Aplikasi E-Government memberikan peluang meningkatkan dan mengoptimalkan hubungan antar instansi pemerintah, hubungan antara

pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat. Mekanisme hubungan itu melalui pemanfaatan teknologi informasi yang merupakan kolaborasi atau penggabungan antara komputer dan sistem jaringan komunikasi. Budi Rianto dkk (2012:39) mengatakan sedikitnya ada empat indikator keberhasilan E-Government, yaitu:

1. Ketersediaan data dan informasi pada pusat data.
2. Ketersediaan data dan informasi bagi kebutuhan promosi daerah.
3. Ketersediaan aplikasi E-Government pendukung pekerjaan kantor dan pelayanan publik.
4. Ketersediaan aplikasi dialog publik dalam rangka meningkatkan komunikasi antar pemerintah, antara pemerintah dengan sektor swasta dan masyarakat melalui aplikasi e-mail, SMS ataupun tele conference.

Selain itu, untuk melaksanakan maksud tersebut pengembangan E-government diarahkan untuk mencapai empat tujuan menurut Inpres RI No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, yaitu:

1. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat tidak dibatasi waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.
2. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan

memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional.

3. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara.
4. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom.

Dalam Jurnal Administrasi Negara (2006:19) dijelaskan bahwa E-government merupakan pemanfaatan dan pendayagunaan teknologi komunikasi dan informasi dalam rangka mencapai beberapa tujuan dan kebutuhan akan :

1. Meningkatkan efisiensi dan cost-effectiveness dari pemerintah;
2. Memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik;
3. Menyediakan akses informasi kepada publik secara lebih luas;
4. Menjadikan penyelenggaraan pemerintah lebih bertanggung jawab dan transparan kepada masyarakat.

Menurut Indrajit (2002:5) manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya konsep e-Government bagi suatu negara, antara lain:

1. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholdernya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja, efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara.
2. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dalam rangka penerapan konsep Good Governance.

3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas
4. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak berkepentingan.

### **2.2.2 Pengembangan E-Government**

Melalui pengembangan e-government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintahan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Berdasarkan sifat transaksi informasi dan pelayanan public yang disediakan oleh pemerintah melalui jaringan informasi, pengembangan e-government dapat dilaksanakan melalui empat tingkatan, yaitu:

- a. Tingkat 1–Persiapan

Pembuatan situs web sebagai media informasi dan komunikasi pada setiap lembaga.-Sosialisasi situs web untuk internal dan public.

- b. Tingkat 2–Pematangan

Pembuatan situs web informasi public yang bersifat interaktif-Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain.

- c. Tingkat 3–Pemantapan

Pembuatan situs web yang bersifat transaksi pelayanan publik-Pembuatan interoperabilitas aplikasi dan data dengan lembaga lain.

- d. Tingkat 4–Pemanfaatan

Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat Government

### **2.2.3 Kebijakan dan Strategi Pengembangan E-Government**

Dalam lampiran Inpres No 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, dengan mempertimbangkan kondisi saat ini, pencapaian tujuan strategis e-government perlu dilaksanakan melalui enam strategi yang berkaitan erat yaitu sebagai berikut:

- a. Mengembangkan sistem pelayanan yang handal, terpercaya serta terjangkau masyarakat luas. Sasarannya antara lain, perluasan dan peningkatan kualitas jaringan komunikasi keseluruhan wilayah Negara. Sasaran lain adalah pembentukan portal informasi dan pelayanan public yang dapat mengintegrasikan sistem manajemen dan proses kerja instansi pemerintah.
- b. Menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah agar dapat mengadopsi kemajuan teknologi informasi secara cepat.
- c. Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Sasaran yang ingin dicapai adalah standarisasi yang berkaitan dengan interoperabilitas pertukaran dan transaksi informasi antar portal pemerintah. Standarisasi dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen dokumen dan informasi elektronik.
- d. Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industry telekomunikasi dan teknologi informasi. Sasaran yang ingin dicapai adalah adanya partisipasi dunia usaha dalam mempercepat pencapaian tujuan strategis e-government.

## **2.3 Anggaran Sektor Publik**

### **2.3.1 Pengertian Anggaran Sektor Publik**

Anggaran merupakan suatu alat yang digunakan manajemen untuk menjalankan rencana–rencana atau target yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan dalam jangka pendek yang dinyatakan dalam satuan unit kuantitatif. Anggaran digunakan sebagai alat atau sistem pengendalian manajemen yang sangat efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi baik di sektor swasta maupun di sektor publik (Wati dkk, 2013). Organisasi sektor publik pada dasarnya membutuhkan sebuah manajemen yang baik dalam melaksanakan tugas berupa visi dan misi yang diembankan oleh negara kepadanya.

Dalam organisasi sektor publik, seperti organisasi pemerintahan, penyusunan anggaran dilakukan bersama masyarakat dalam perencanaan program, sedangkan dalam sektor swasta, penyusunannya dilakukan oleh manajer perusahaan yang berwenang dengan persetujuan pemilik perusahaan (Bastian, 2010,71). Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program (Putradkk, 2015). Anggaran pada sektor publik harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik dan diberi masukan (Putra dkk, 2015).

Anggaran merupakan rencana yang menjabarkan tujuan dan kegiatan perusahaan dimasa yang akan datang yang bersifat kuantitatif dan dinyatakan dalam satuan moneter. Hal-hal yang dihindari perlu terkait dengan penyusunan anggaran salah satunya adalah kesenjangan anggaran (Fahrinda & Cris, 2022).

### 2.3.2 Fungsi Anggaran

Dalam organisasi sektor publik menerapkan sistem anggaran dalam kegiatan operasionalnya, maka dari itu anggaran memiliki beberapa fungsi menurut Sujarweni(2015, 29) adalah sebagai berikut :

- a. Alat Perencanaan : Anggaran berfungsi sebagai merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan yang akan dilaksanakan oleh organisasi sektor publik beserta rincian biaya yang dibutuhkan dan rencana sumber pendapatan yang akan diperoleh organisasi sektor publik.
- b. Alat Pengendalian : Anggaran sebagai alat pengendalian ini dapat digunakan untuk mengendalikan kekuasaan eksekutif.
- c. Alat Kebijakan : Fiskal Dengan menggunakan anggaran dapat diketahui bagaimana kebijakan fiskal yang akan dijalankan organisasi sektor publik, hal ini akan mempermudah untuk memprediksi dan mengestimasi ekonomi dan organisasi.
- d. Alat Politik : Bentuk dokumen politik dapat dijadikan komitmen kesepakatan eksekutif dan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu.
- e. Alat Koordinasi dan Komunikasi : Dalam perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran dilakukan komunikasi dan koordinasi antar unit kerja bagian seluruh bagian organisasi. Anggaran yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja didalam pencapaian tujuan organisasi.
- f. Alat Penilaian Kerja : Anggaran merupakan alat yang efektif untuk

melakukan pengendalian dan penilaian kinerja. Dimana penilaian kinerja organisasi sektor publik akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran.

- g. Alat Motivasi : Anggaran dapat digunakan untuk memberi motivasi bagi pimpinan dan karyawan dalam bekerja secara efektif dan efisien. Dengan membuat anggaran yang tepat dan dapat melaksanakannya sesuai target dan tujuan organisasi, maka manajemen dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik.
- h. Alat Menciptakan Ruang Publik : Keberadaan anggaran tidak boleh diabaikan oleh berbagai organisasi sektor publik seperti birokrat, DPR/MPR, masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan berbagai organisasi kemasyarakatan lainnya.

Beberapa pihak tersebut terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penganggaran publik. Kelompok masyarakat yang terorganisir juga akan selalu berusaha untuk mempengaruhi besarnya anggaran pemerintah. Sedangkan kelompok masyarakat yang tidak terorganisir akan mempercayakan pendapat dan aspirasinya melalui proses politik.

Menurut Nafarin (2015, h.28-30) anggaran memiliki beberapa fungsi sebagai berikut :

- a. Fungsi Perencanaan : Fungsi perencanaan didalam anggaran digunakan untuk menentukan rencana belanja dan sumber dana se efisien mungkin.
- b. Fungsi Pelaksanaan Anggaran : dalam fungsi pengawasan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan, artinya sebelum pekerjaan

dilaksanakan terlebih dahulu mendapat persetujuan yang berwenang (terutama dalam hal keuangan).

- c. Fungsi Pengawasan Anggaran : merupakan alat pengawasan atau pengendalian (controlling). Pengawasan berarti mengevaluasi (menilai) terhadap pelaksanaan pekerjaan.

### **2.3.3 Manfaat Anggaran**

Anggaran memiliki banyak manfaat, antara lain (Nafarin, 2004 h. 15-16) sebagai berikut :

- a. Segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama. Melalui anggaran setiap kegiatan yang akan dilaksanakan akan mengarah atau menuju satu hasil tujuan yang sama.
- b. Dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan pegawai. Anggaran dapat digunakan untuk atasan menilai kelebihan dan kekurangan pegawai melalui kinerja.
- c. Dapat memotivasi pegawai. Anggaran bisa menjadi salah satu motivasi pegawai dalam mencapai target anggaran.
- d. Menimbulkan rasa tanggung jawab kepada pegawai. Akibat yang ditimbulkan dari anggaran adalah rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan atau apa yang telah dipercayakan atasan kepada pegawai.
- e. Menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu. Dari segi biaya, anggaran dapat meminimalisir terjadinya pemborosan atau Manfaat anggaran menurut Ahyari (1988 h.5-7) adalah sebagai berikut :
  - a. Terdapatnya perencanaan terpadu. Dengan mempergunakan anggaran,

perusahaan akan dapat menyusun perencanaan seluruh kegiatan secara terpadu, tidak ada satupun kegiatan perusahaan yang terlepas dari anggaran.

- b. Terdapatnya pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan. Dengan adanya anggaran perusahaan, maka pelaksanaan kegiatan yang ada dalam perusahaan tersebut dapat dilaksanakan dengan pasti, karena dapat mendasarkan diri kepada anggaran yang telah ada.
- c. Terdapatnya alat koordinasi dalam perusahaan. Pelaksanaan kegiatan didalam perusahaan dibawah koordinasi yang baik, hal ini karena didalam penyusunan anggaran tersebut sudah dipertimbangkan kaitan satu dengan bagian anggaran lainnya.
- d. Terdapatnya alat pengawasan yang baik. Alat pengawasan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan di perusahaan.

Sehingga dapat disimpulkan anggaran memiliki banyak manfaat yang dapat meningkatkan kinerja dari pegawai karena anggaran dianggap sebagai alat pengawasan manajer. Anggaran dapat dijadikan sarana untuk mengevaluasi setiap kegiatan dilaksanakan. Sehingga manfaat anggaran dapat dirasakan oleh seluruh anggota perusahaan tersebut.

#### **2.4 Penelitian Terdahulu**

Penelitian tentang elektronik parkir (e-parking) sudah banyak dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu, penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar penulis dalam menyusun penelitian ini. Penulis akan melampirkan beberapa penelitian terdahulu yang dianggap relevan yang sesuai dengan judul penelitian penulis yaitu:

Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu

1	Peneliti	Roni Nur Rahman
	Judul Penelitian	Penerapan Parkir Elektronik (E-Parking) di Kota Surakarta Sebagai Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/186/SJ Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
	Metode	Deskriptif, Kualitatif
	Hasil	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penerapan atau implementasi parkir elektronik di Kota Surakarta dilandasi dari surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/ SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota, mengetahui apa saja kendala dalam menerapkan e-parking, kebijakan yang dapat dilakukan melalui e-parking untuk mencegah kebocoran PAD serta mencegah adanya pemungutan liar tarif parkir. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dan metode analisis data deskriptif analitis
	Perbedaan	Meliputi lokasi penelitian, metode penelitian serta penelitian ini lebih berfokus pada perbedaan dampak sebelum dan sesudah di terapkannya e-parking di kota
2	Peneliti	Sopbaba, Rusmiwari, Hardianto (2015)
	Judul Penelitian	Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah
	Metode	Deskriptif, Kualitatif
	Hasil	Kontribusi retribusi parkir belum dapat berkontribusi tinggi karena ada dalam rasio 0,00-10,00%
	Perbedaan	Meliputi lokasi penelitian serta lebih membahas efektivitas program terminal parkir elektronik sebagai perwujudan smart city
3	Peneliti	Desak Putu Merry Astuti
	Judul Penelitian	Analisis Pelaksanaan <i>E-Parking</i> Dalam Pembayaran Restribusi Parker Di Kabupaten Tabanan
	Metode	Kualitatif
	Hasil	Hasil dari penelitian ini adalah untuk mengetahui system informasi akutansi, efektivitas e-parking dan

		kelebihan maupun kekurangan dari penggunaan e-parking.
	Perbedaan	Pada penelitian ini meneliti tentang akutansi, efektivitas e-parking, dan restri busi parkir

## 2.5 Kerangka Berpikir

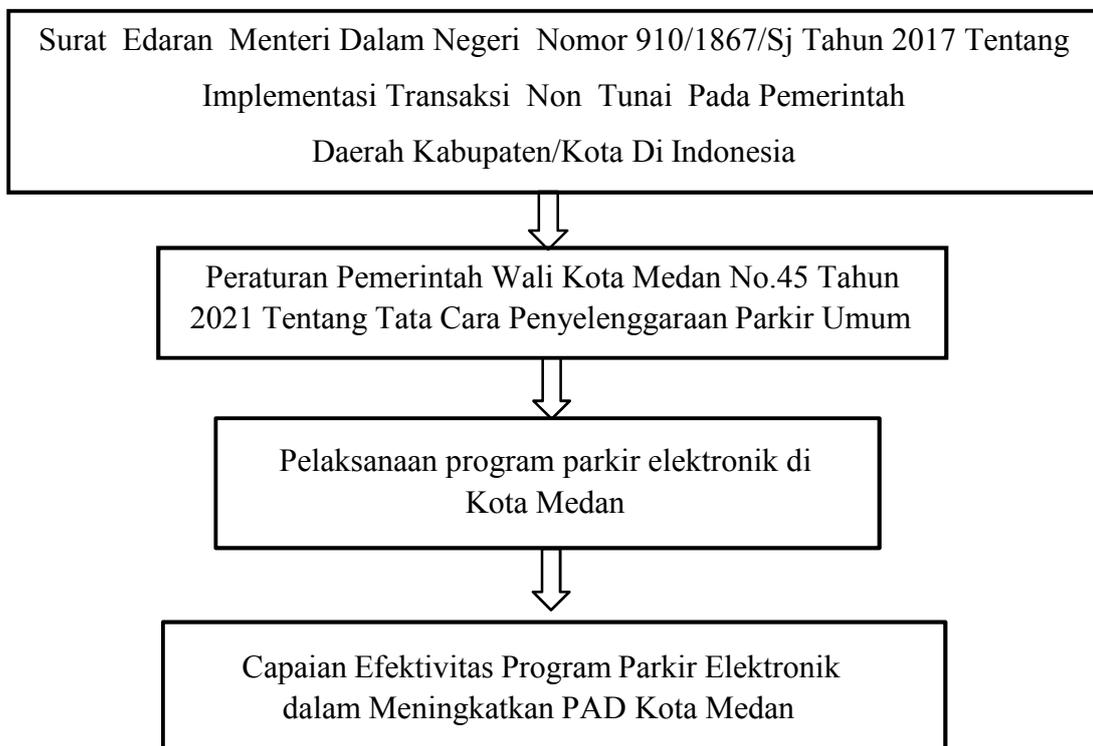
Adanya himbauan dari Menteri Dalam Negeri yang mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ Tahun 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Berdasarkan himbauan tersebut menjadi latar belakang pemerintah Kota Medan melalui keputusan yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Medan No.45 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Parkir Umum untuk membuat sistem parkir di Kota Medan yang lebih baik demi meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat pengguna parkir melalui sistem elektronik parkir (e-parking)(Gea, 2012).

Program elektronik diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam membayar parkir, dapat menghindari juru parkir nakal, pembayaran dapat lebih transparan serta akurat, sehingga pihak terkait dapat mengetahui secara terperinci terkait jumlah retribusi parkir dan dapat memaksimalkan PAD dari segi retribusi parkir. Berdasarkan proses pelaksanaannya yang menjadi sasaran utama program e-parking ini yaitu ditunjukkan kepada masyarakat, sebab e-parking merupakan pelayanan bagi masyarakat dibidang perparkiran yang lebih efektif dan efisien.

Dengan berbagai kecanggihan dan keunggulan yang ditawarkan oleh sistem parkir berbasis elektronik (e-parking) ini tentunya masyarakat memiliki banyak penilaian, respon dan saran yang dapat diberikan guna untuk membuat

sistem e-parking ini menjadi lebih baik serta dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan e-parking. Berikut ini adalah skema kerangka berpikir untuk memudahkan dalam memahami penelitian yang akan dilakukan. Berikut kerangka berpikir dalam penelitian ini :

Gambar 2.1 Kerangka berpikir



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Adapun jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, dimana metode penelitian ini yang berusaha mengungkapkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data yang aktual, yakni dengan mengumpulkan data, menganalisis dan menginterpretasikannya. Metode kualitatif merupakan kumpulan metode untuk menganalisis dan memahami lebih dalam mengenai makna beberapa individu maupun kelompok dianggap sebagai masalah kemanusiaan atau masalah sosial Creswell (2015) (Fiantika, 2022).

Jenis penelitian kualitatif yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus merupakan studi yang mengeksplorasi suatu kasus secara mendalam, mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Kasus ini dapat berupa suatu peristiwa, aktivitas, proses, dan program (Creswell, 2016)(Rahmat, 2009). Dalam penelitian kualitatif peneliti berusaha untuk dapat mengamati dan mengungkapkan realitas yang terjadi lapangan dan ingin mengetahui serta melihat langsung secara mendalam bagaimana efektivitas program parkir elektronik dalam meningkatkan PAD kota Medan.

## 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

### 3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau objek untuk diadakan suatu penelitian. Lokasi penelitian ini ada di Dinas Perhubungan Kota Medan. Alasan peneliti melakukan penelitian di Dinas Perhubungan Kota Medan adalah, karena dapat diperoleh data primer atau data secara langsung retribusi parkir yang masuk, dimana dinas perhubungan kota medan melakukan mekanisme pemungutan retribusi parkir melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) kota Medan yang melakukan kerjasama atau memberikan pihak ketiga dalam mengelola parkir di dalam sistem pelelangan atau penunjukan.

### 3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian yang berjudul “Efektivitas Program Parkir Elektronik dalam Meningkatkan PAD Kota Medan” tersebut dilakukan dalam jangka waktu 6 bulan, yakni dari bulan Maret 2023 hingga bulan Agustus 2023. Berikut adalah tabel jadwal kegiatan penelitian :

Tabel 3.2 Jadwal Kegiatan penelitian

Jenis Kegiatan	Maret 2023	April 2023	Mei 2023	Juni 2023	Juli 2023	Agu 2023
1. Persiapan Penelitian						
a. Pengajuan Judul						
b. Penyusunan Proposal						

2. Seminar Proposal					
a. Revisi dan Perijinan					
3. Perencanaan penelitian					
4. Pelaksanaan Penelitian					
5. Penyusunan Laporan					
6. Sidang dan Revisi					

### 3.3 Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memahami informasi objek penelitian dan dapat memberikan informasi kepada peneliti sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan informasi. Oleh karena itu pada penelitian kualitatif ini tidak dikenal dengan adanya populasi atau sampel (Bagong Suyanto, 2005: 171) (Wicaksana & Rachman, 2018). Subjek penelitian yang telah tercermin dalam fokus penelitian tidak ditentukan secara sengaja. Sunjek penelitian yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian.

Adapun yang menjadi informan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Informan Kunci, yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Pegawai bidang administrasi di kantor Dinas Perhubungan Kota Medan yang mengurus urusan data redistribusi parkir yang masuk dari penggunaan e-parking di Kota Medan.

2. Informan Utama, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang akan diteliti. Informan utama dalam penelitian ini adalah masyarakat pengguna transportasi kendaraan yang menggunakan parkir di Kota Medan dimana akan digunakan peneliti dalam mengukur efektivitas program e-parking tersebut.
3. Informan Tambahan, adalah individu maupun grup yg dijadikan menjadi asal data atau isu sekunder dalam menyampaikan gambaran pendukung asal data primer terkait dilema penelitian. Informan pendukung artinya orang yang dapat memberikan informasi tambahan menjadi pelengkap analisis dan pembahasan pada penelitian kualitatif. Yang menjadi informan tambahan dalam penelitian ini adalah juru parkir yang bekerja di wilayah yang sudah diterapkan e-Parking di Kota Medan.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Data-data penelitian diperoleh dari beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara. Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan cara berhubungan dengan responden. Hal tersebut dapat berupa bincang secara langsung atau

menggunakan media komunikasi. Sugiyono (2016:138) mengemukakan ada dua macam wawancara, antara lain adalah wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur(Sugiono, 2021). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua teknik wawancara yaitu:

a) Wawancara terstruktur

Teknik wawancara terstruktur dengan memakai pedoman instrument berupa pertanyaan yang jelas dan sistematis yang telah dipersiapkan sebelumnya. Wawancara terstruktur menuntut peneliti menyiapkan segala sesuatu dengan rinci sehingga perlu dilakukannya observasi terlebih dahulu. Peneliti melakukan wawancara terstruktur dengan pegawai bidang parkir pada Dinas Perhubungan Kota Medan.

b) Wawancara tidak terstruktur

Wawancara tidak terstruktur lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Responden bisa lebih terbuka dalam mengungkapkan pendapatnya. Dalam hal melakukan wawancara tidak terstruktur dengan masyarakat pengguna jasa parkir yang wilayahnya sudah terapkan e-parking.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah ada dikumpulkan atau data yang sudah tersedia untuk peneliti yang diperoleh melalui media perantara yang diperoleh melalui:

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan mengumpulkan data berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang akan diambil oleh peneliti antara lain data-data pemasukan dari redistribusi parkir elektronik berupa arsip data pendapatan asli daerah (PAD) khusus perparkiran di kantor Dinas Perhubungan Kota Medan serta aktivitas masyarakat pengguna parkir elektronik yang membayar uang jasa parkirnya melalui pembayaran non tunai yaitu melalui e-parking.

b. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini peneliti melakukan studi kepustakaan dengan cara online dan offline, dimana peneliti melakukan sebuah pencarian atau *searching* melalui media internet (online) dan pencarian data informasi pada buku skripsi terdahulu guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

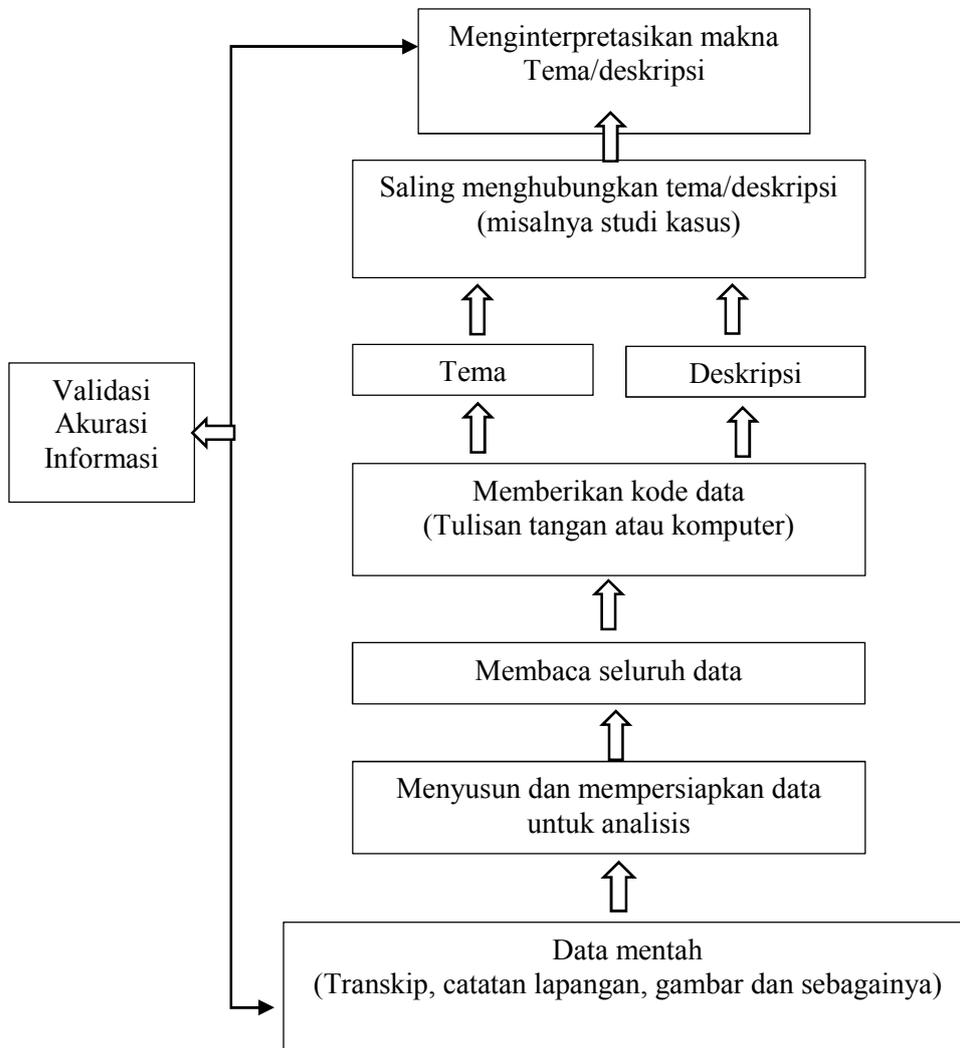
### **3.5 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data menurut John W. Creswell, mendefinisikan analisis data dalam penelitian kualitatif akan berlangsung bersamaan dengan bagian-bagian lain dari pengembangan penelitian kualitatif, yaitu pengumpulan data dan penulisan temuan. Ketika wawancara peneliti menganalisis memo yang akan dimasukkan sebagai narasi dalam laporan akhir dan menyusun struktur laporan akhir (Fiantika, 2022).

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengelola dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara men-scanning materi, menetik data lapangan, atau memilih-milih dan menyusun data tersebut kedalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada informasi.
2. Membaca keseluruhan data, membangun general scene atau informasi yang diperoleh dan memfleksibelkan maknanya secara keseluruhan.
3. Menganalisis lebih detail dengan mencoding data. Coding merupakan proses mengelola materi informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya.
4. Menetapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting orang-orang, kategori-kategori dan tema-tema ini akan dianalisis.
5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi laporan kualitatif.
6. Langkah terakhir dalam analisis data adalah menginterpretasi atau memaknai data, mengajukan pertanyaan seperti pelajaran apa yang dapat diambil dari semua ini. Akan mengungkapkan esensi dari suatu gagasan.

Gambar 3.1 Teknik Analisis Data



Sumber, Jhon W. Creswell, gambar teknik analisis data

